

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA



**DAMPAK PERANAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMAHAMAN
AKUNTANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, SERTA PERAN INTERNAL AUDIT
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
(Studi Pada SKPD Kota Semarang)**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Ketua/Anggota Tim

1. LILIS SETYOWATI, SE (0607018703)
2. WIKAN ISTHIKA, SE., M.Ec (0610118702)

Dibiayai oleh:
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Pemula Bagi Dosen
Perguruan Tinggi Swasta

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
OKTOBER 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Dampak Peranan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : LILIS SETYOWATI
NIDN : 0607018703
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 081229398806
Surel (e-mail) : lilis_setyowati7@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : WIKAN ISTHIKA S.E.
NIDN : 0610118702
Perguruan Tinggi : Universitas Dian Nuswantoro

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 12.500.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 14.893.000,00

Mengetahui
Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis

Semarang, 3 - 11 - 2014,
Ketua Peneliti,

(Dr. Agus Prayitno)
NIP/NIK 0686.11.1992.024

(LILIS SETYOWATI)
NIP/NIK0686.11.2010.388

Menyetujui,
Kepala Pusat Penelitian

(Juli Ratnawati, SE., M.Si)
NIP/NIK 0686.11.2000.193

RINGKASAN

Adanya fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tidak memenuhi kriteria sebagai syarat-syarat laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Populasi dalam penelitian ini SKPD yang menyampaikan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Untuk selanjutnya pengujian data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda antara variabel independen dengan dependen baik secara simultan maupun secara parsial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen yang diturunkan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,587 lebih besar dari nilai 0. Pengaruh sebesar 58,7% menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah karena nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,587$ lebih kecil dari 0,6. Diduga masih ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sementara itu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial menunjukkan bahwa pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi $0,504 > 0,05$, kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ dan $0,004 < 0,05$.

Kata Kunci: Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat. Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga kami dapat melaksanakan penelitian ini dan menyusun laporan akhir ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.

Harapan kami semoga laporan penelitian ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Penelitian ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4 LUARAN PENELITIAN	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 AKUNTABILITAS	4
2.2 TRANSPARANSI.....	5
2.3 PENGAWASAN	6
2.4 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	7
2.5 HIPOTESIS PENELITIAN.....	8
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
3.1 TUJUAN PENELITIAN.....	9
3.2 MANFAAT PENELITIAN	9
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	10
4.1 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL.....	10
4.1.1 VARIABEL PENELITIAN	10
4.1.2 DEFINISI OPERASIONAL.....	10
4.2 JENIS DAN SUMBER DATA.....	13
4.3 METODE PENGUMPULAN DATA	14
4.4 MODEL ANALISIS	14

BAB 5	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
5.1	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	19
5.1.1	GAMBARAN UMUM RESPONDEN	19
5.1.2	KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	19
5.1.3	KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA	20
5.1.4	KARAKTERISTIK REESPONDEN BERDASARKAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENDIDIKAN PELATIHAN TENTANG KEUANGAN DAERAH.....	20
5.2	STATISTIK DESKRIPTIF.....	21
5.2.1	VARIABEL PEMAHAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	21
5.2.2	VARIABEL PEMAHAMAN AKUNTANSI	22
5.2.3	VARIABEL KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA..	22
5.2.4	VARIABEL PERAN INTERNAL AUDIT	23
5.2.5	VARIABEL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.	24
5.3	ANALISIS DATA KUANTITATIF	25
5.3.1	UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	25
5.3.2	UJI NORMALITAS.....	28
5.3.3	UJI MULTIKOLINIERITAS.....	29
5.3.4	UJI HETEROSKEDASTISITAS.....	30
5.3.5	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	31
5.3.6	ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI	33
5.4	PEMBAHASAN	34
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
6.1	KESIMPULAN.....	36
6.2	SARAN.....	36
	DAFTAR PUSTAKA	37
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden	19
Tabel 5.2	Usia Responden	20
Tabel 5.3	Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah	20
Tabel 5.4	Tanggapan Responden tentang Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	21
Tabel 5.5	Tanggapan Responden tentang Pemahaman Akuntansi	22
Tabel 5.6	Tanggapan Responden tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia	22
Tabel 5.7	Tanggapan Responden tentang Peran Internal Audit	23
Tabel 5.8	Tanggapan Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah	24
Tabel 5.9	Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	25
Tabel 5.10	Uji Validitas Variabel Pemahaman Akuntansi	26
Tabel 5.11	Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	26
Tabel 5.12	Uji Validitas Variabel Peran Internal Audit	27
Tabel 5.13	Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	27
Tabel 5.14	Uji Reliabilitas Variabel	28
Tabel 5.15	Uji Multikolinieritas	29
Tabel 5.16	Hasil Uji Glejser	31
Tabel 5.17	Koefisien Regresi.....	31
Tabel 5.18	Hasil Uji F	33
Tabel 5.19	Koefisien Determinasi	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran	10
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas	28
Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas	30

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner

Tabulasi Data

Laporan Penggunaan Dana

Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari oenerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan salah satunya yaitu sistem akuntansil.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahawa Laporan Keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini berarti Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2012 disajikan secara wajar

untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, karena opini Wajar tanpa Pengecualian tidaklah menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bebas dari kecurangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonosobo, kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal untuk Tahun Anggaran 2012, hanya ada tiga Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu Pemerintah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Boyolali. Sedangkan delapan Pemerintah Daerah lainnya masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun alporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan atau peran internal audit yang masih lemah.

Untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, maka jajaran akademisi perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Kota Semarang. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang ?
2. Apakah pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang ?

3. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang ?
4. Apakah peran Internal Audit mempunyai pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang
4. Untuk menganalisis pengaruh peran Internal Audit terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Semarang

1.4. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu Publikasi jurnal nasional ber ISSN

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dengan demikian Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu

informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain).

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses kuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

2.4 Peran Internal Audit

Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Sawyer's (2005) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan:

1. Apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Apakah risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
4. Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif

Dalam *The International Standart for the Professional Practice of Internal Auditng*, peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memebrikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis lingkup penugasan assurance

ditentukan oleh auditor internal. Sedangkan jasa konsultasi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien. Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tujuan laporan keuangan sektor publik berbeda dengan sektor swasta, Laporan Keuangan sektor swasta mempunyai tujuan mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik antara lain: (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, (2) melaporkan hasil operasi, (3) melaporkan kondisi keuangan, dan (4) melaporkan sumber daya jangka panjang.

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.

Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai:

1. Pengurusan dan ketaatan
2. Kondisi keuangan
3. Kinerja
4. Dampak ekonomi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan meliputi dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Pemerintahan Kota Semarang
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Pemerintahan Kota Semarang
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Pemerintahan Kota Semarang
4. Untuk menganalisis pengaruh peran Internal Audit terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan pada Pemerintahan Kota Semarang

3.2 Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai pentingnya peranan teknologi SIA keuangan daerah dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangannya
2. Masyarakat, dapat menambah wacana mengenai peranan teknologi SIA dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kota Semarang

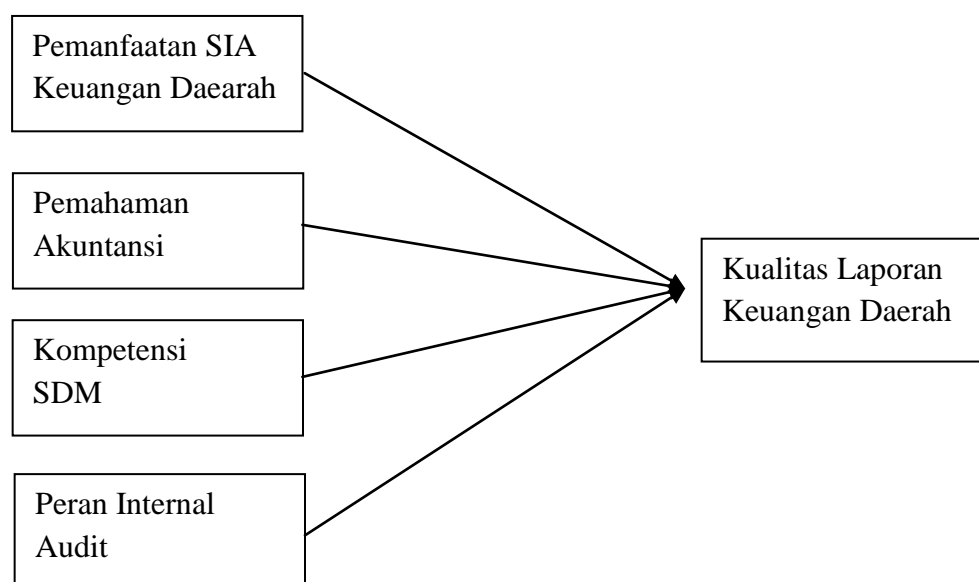
BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pemahaman akuntansi, kompetensi Sumber Daya Manusia, dan peran Internal Audit sebagai variabel independen dengan kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka Pemikiran

4.1.2 Definisi Operasional

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah penerapan sistem

informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ini dapat diukur dengan skala interval lima point. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- b. Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan analisis transaksi / identifikasi transaksi
- c. Pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan
- d. Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini didukung oleh bukti transaksi
- e. Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis
- f. Instansi pemerintahan melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi
- g. Instansi pemerintahan melakukan pengklasifikasian transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya
- h. Instansi pemerintahan melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan
- i. Instansi pemerintahan membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi
- j. Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik

2. Pemahaman Akuntansi

Paham terhadap akuntansi yaitu mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemahaman akuntansi ini dapat diukur dengan skala interval lima point. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi
- b. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.

Kompetensi sumber daya manusia ini dapat diukur dengan skala interval lima point. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi, ekonomi dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan ekonomi oleh pihak yang memerlukan
- b. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah: $Aset - Kewajiban = Ekuitas Dana$
- c. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
- d. Dinas ini mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai
- e. Jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, pegawai pada bagan keuangan / akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat
- f. Jika ada peraturan baru tentang akuntansi pemerintahan, pegawai pada bagian keuangan / akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat
- g. Dalam pelaksanaan tugas diselesaikan secara tepat waktu dan efektif
- h. Bapak/Ibu memahami struktur organisasi pada instansi / dinas tempat bekerja
- i. Bapak/Ibu mematuhi kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

4. Peran Internal Audit

Internal auditing yaitu suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Peran internal audit ini dapat diukur dengan skala interval lima point. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Penilaian keandalan informasi keuangan
- b. Penilaian ketaatan
- c. Penilaian kinerja
- d. Penilaian efisiensi dan efektivitas program

5. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah dapat dipandang sebagai kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan suatu organisasi.

Kualitas laporan keuangan daerah dapat diukur dengan skala interval lima point. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu
- b. Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang
- c. Penyajian / penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi
- d. Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan
- e. Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan
- f. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
- g. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
- h. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah subyek opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek peneliti atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan sumber datanya adalah primer dari jawaban kuesioner responden secara langsung yang akan dikirim kepada kantor Serikat Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang karena merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintah pada Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007.

Sampel

Sampel menurut Indriantoro dan Supomo (2002) adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan proses tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan relatif dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- a. Semua karyawan pria dan wanita
- b. Bekerja pada kantor SKPD Kota Semarang sebagai karyawan tetap
- c. Menjabat sebagai Kepala keuangan atau staff keuangan
- d. Bekerja lebih dari satu tahun pada kantor SKPD

Berikut ini adalah daftar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang:

Tabel 1
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang

NO	UNIT KERJA
1.	Setda
2.	Set DPRD
3.	Inspektorat
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Badan Lingkungan Hidup
6.	Badan Kesbangpol & Linmas
7.	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu
8.	Badan Kepegawaian Daerah

9.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12.	Dinas Bina Marga
13.	Dinas Kesehatan
14.	Dinas Pendidikan
15.	Dinas Pertanian
16.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18.	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga
19.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Dinas Kebakaran
22.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
23.	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
24.	Dinas Tata Kota dan Perumahan
25.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26.	Dinas Pasar
27.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
28.	Dinas Kelautan dan Perikanan
29.	Dinas PSDA dan Energi Sumber Daya Mineral
30.	Satpol Pamong Praja
31.	Kantor Diklat
32.	Kantor Ketahanan Pangan
33.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
34.	Kec. Genuk
35.	Kec. Gayamsari
36.	Kec. Pedurungan
37.	Kec. Semarang Timur
38.	Kec. Semarang Tengah
39.	Kec. Semarang Utara
40.	Kec. Banyumanik
41.	Kec. Semarang Selatan
42.	Kec. Candisari
43.	Kec. Gajahmungkur
44.	Kec. Tembalang
45.	Kec. Gunung Pati
46.	Kec. Mijen
47.	Kec. Ngalian
48.	Kec. Tugu
49.	Kec. Semarang Barat
50.	RSUD

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

4.3 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, yaitu demografi responden. Bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan.

Kuesioner diberikan secara langsung. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya diambil langsung oleh peneliti. Angket yang telah diisi oleh responden diseleksi terlebih dahulu agar angket yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.

4.4 Model Analisis

Supaya data yang diperoleh bermanfaat, maka diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam penelitian ini merupakan analisis yang berdasarkan data jawaban responden yang masih berupa angka-angka dan kemudian dinyatakan dalam bentuk uraian prosa sehingga diperoleh gambaran tanggapan responden.

2. Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif merupakan analisis yang lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh. Dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

X_1 : Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah

X_2 : Pemahaman Akuntansi

X_3 : Kompetensi SDM

X_4 : Peran Internal Audit

Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah

a : Konstan

e : Galat (*error terms*)

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Objek Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden menunjukkan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan responden secara individual. Gambaran umum responden akan memberikan deskripsi mengenai keadaan dari responden yang didistribusikan pada Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang yang berjumlah 65 kuesioner dan hanya sejumlah 51 kuesioner yang kembali termasuk 4 kuesioner tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 47 kuesioner (72,31%).

Adapun rincian jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Rincian Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total
Kuesioner yang dikirim	65
Total kuesioner kembali	51
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	4
Total kuesioner yang digunakan	47
Tingkat pengembalian yang digunakan	72,31%

Sumber: data primer diolah, 2014

Adapun karakteristik responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Profil Responden

Uraian	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	14	29,79%
b. Perempuan	33	70,21%
Usia		
a. < 40 tahun	18	38,30%
b. 40 – 50 tahun	22	46,81%
c. > 50 tahun	7	14,89%
Lama Bekerja		
a. < 10 tahun	12	25,53%
b. 10 – 15 tahun	11	23,40%
c. > 15 tahun	24	51,07%

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu 33 orang atau 70,21% dan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang atau 29,79%.

Sebagian besar responden berusia 40 – 50 tahun sebanyak 46,81% responden yang berusia < 40 tahun sebanyak 18 orang atau 38,30% dan yang berusia > 50 tahun sebanyak 7 orang atau 14,89%.

Sebagian besar responden lama kerjanya > 15 tahun sebanyak 51,07% responden yang lama bekerjanya < 10 tahun sebanyak 12 orang atau 25,53% dan yang berusia 10 - 15 tahun sebanyak 11 orang atau 23,40%.

5.2 Statistik Deskriptif

5.2.1 Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan lima skala likert yang dibagi menjadi 10 pertanyaan. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3

Tanggapan Responden tentang Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

No	Indikator	Perhitungan										Jml	
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		setuju		sangat setuju			
1.	Sistem informasi akuntansi yang diterapkan sesuai dengan SAP	0	0%	1	2,1%	2	4,3%	32	68,1%	12	25,5%	47	100%
2.	Setiap transaksi keuangan dilakukan analisis transaksi	0	%	0	%	0	%	38	%	9	%	47	100%
3.	Dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan	0	0%	0	0%	1	2,1%	38	80,9%	8	17,0%	47	100%
4.	Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi	0	0%	0	0%	0	0%	27	57,4%	20	42,6%	47	100%
5.	Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis	0	0%	0	0%	1	2,1%	34	72,3%	12	25,5%	47	100%

6.	Melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	0	0%	0	0%	2	4,3%	36	76,6%	9	19,1%	47	100%
7.	Melakukan pengklasifikasian transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya	0	0%	0	0%	3	6,4%	31	66,0%	13	27,7%	47	100%
8.	Melakukan sistem pemngendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan	0	0%	0	0%	1	2,1%	39	83,0%	7	14,9%	47	100%
9	Membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi	0	0%	0	0%	1	2,1%	32	68,1%	14	29,8%	47	100%
10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik	0	0%	0	0%	0	0%	30	63,8%	17	36,2%	47	100%

5.2.2 Variabel Pemahaman Akuntansi

Variabel pemahaman akuntansi diukur dengan lima skala likert yang dibagi menjadi 2 item pertanyaan. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Tanggapan Responden tentang Pemahaman Akuntansi

No	Indikator	Perhitungan										Jml	
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		setuju		sangat setuju			
1.	Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi	0	0%	0	0%	6	12,8%	30	63,8%	11	23,4%	47	100%
2.	Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan	0	0%	0	0%	4	8,5%	33	70,2%	10	21,3%	47	100%

5.2.3 Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan lima skala likert yang dibagi menjadi 10 item pertanyaan. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5

Tanggapan Responden tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Perhitungan											
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		setuju		sangat setuju		Jml	
1.	Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi, ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan ekonomi oleh pihak yang memerlukan	0	0%	0	0%	0	0%	30	63,8%	17	36,2%	47	100%
2.	Persamaan dasar akuntansi pemerintah adalah Aset-Kewajiban = Ekuitas	0	0%	0	0%	3	6,4%	30	63,8%	14	29,8%	47	100%
3.	SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%	40	85,1%	7	14,9%	47	100%
4.	Keikutsertaan pegawai pada diklat pegawai	0	0%	0	0%	4	8,5%	33	70,2%	10	21,3%	47	100%
5.	Sosialisasi kepada pegawai bagian keuangan jika ada peraturan baru tentang keuangan	0	0%	1	2,1%	4	8,5%	33	70,2%	9	19,1%	47	100%
6.	Sosialisasi kepada pegawai bagian keuangan jika ada peraturan baru tentang akuntansi pemerintahan	0	0%	0	0%	6	12,8%	30	63,8%	11	23,4%	47	100%
7.	Pelaksanaan tugas diselesaikan secara tepat waktu dan efektif	0	0%	0	0%	3	6,4%	37	78,7%	7	14,9%	47	100%
8.	Pemahaman terhadap struktur organisasi	0	0%	0	0%	1	2,1%	34	72,3%	12	25,5%	47	100%
9.	Kepatuhan terhadap kewajiban sebagai PNS	0	0%	0	0%	0	0%	31	66,0%	16	34,0%	47	100%

5.2.4 Variabel Peran Internal Audit

Variabel peran internal audit diukur dengan lima skala likert yang dibagi menjadi 5 item pertanyaan. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6

Tanggapan Responden tentang Peran Internal Audit

No	Indikator	Perhitungan										Jml	
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		Setuju		sangat setuju			
1.	Penilaian keandalan informasi keuangan	0	%	0	%	3	6,4%	36	76,6%	8	17,0%	47	100%
2.	Penilaian ketaatan	0	0%	0	0%	1	2,1%	31	66,0%	15	31,9%	47	100%
3.	Penilaian kinerja	0	0%	0	0%	2	4,3%	36	76,6%	9	19,1%	47	100%
4.	Penilaian efisiensi dan efektivitas program	0	0%	0	0%	4	8,5%	37	78,7%	6	12,8%	47	100%

5.2.5 Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Variabel peran Kualitas Laporan Keuangan Daerah diukur dengan lima skala likert yang dibagi menjadi 9 item pertanyaan. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Tanggapan Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Indikator	Perhitungan										Jml	
		sangat tidak setuju		tidak setuju		ragu – ragu		Setuju		sangat setuju			
1.	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu	0	0%	0	0%	3	6,4%	36	76,6%	8	17,0%	47	100%
2.	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang	0	0%	2	4,3%	8	17,0%	31	66,0%	6	12,8%	47	100%
3.	Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi	0	0%	0	0%	2	4,3%	34	72,3%	11	23,4%	47	100%

4.	Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan	0	0%	0	0%	1	2,1%	36	76,6%	10	21,3%	47	100%
5.	Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi keuangan lainnya yang seharusnya disajikan	0	0%	0	0%	4	8,5%	37	78,7%	6	12,8%	47	100%
6.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	0	0%	0	0%	5	10,6%	37	78,7%	6	10,6%	47	100%
7.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama	0	0%	0	0%	4	8,5%	37	78,7%	6	12,8%	47	100%
8.	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan SAP	0	0%	0	0%	2	4,3%	36	76,6%	9	19,1%	47	100%

5.3 Analisis Data Kuantitatif

5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Di bawah ini dijelaskan valid tidaknya kuesioner.

Tabel 5.8

Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,251	0,442	Valid
2	Pertanyaan 2	0,251	0,559	Valid
3	Pertanyaan 3	0,251	0,515	Valid
4	Pertanyaan 4	0,251	0,621	Valid

5	Pertanyaan 5	0,251	0,559	Valid
6	Pertanyaan 6	0,251	0,583	Valid
7	Pertanyaan 7	0,251	0,592	Valid
8	Pertanyaan 8	0,251	0,560	Valid
9	Pertanyaan 9	0,251	0,730	Valid
10	Pertanyaan 10	0,251	0,494	Valid

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui uji validitas variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua hasil r hitung pada indikator sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk pemahaman akuntansi adalah sebagai berikut

Tabel 5.9

Uji Validitas Variabel Pemahaman Akuntansi

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,251	0,634	Valid
2	Pertanyaan 2	0,251	0,634	Valid

Berdasarkan pada Tabel 5.9 diketahui bahwa uji validitas indikator pemahaman akuntansi hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua hasil r hitung pada indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada variabel pemahaman akuntansi dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 5.10

Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,251	0,435	Valid
2	Pertanyaan 2	0,251	0,286	Valid
3	Pertanyaan 3	0,251	0,607	Valid
4	Pertanyaan 4	0,251	0,402	Valid
5	Pertanyaan 5	0,251	0,471	Valid

6	Pertanyaan 6	0,251	0,422	Valid
7	Pertanyaan 7	0,251	0,445	Valid
8	Pertanyaan 8	0,251	0,354	Valid
9	Pertanyaan 9	0,251	0,461	Valid

Berdasarkan Tabel 5.10 diketahui bahwa uji validitas indikator kompetensi sumber daya manusia hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua nilai r hitung pada indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada kompetensi sumber daya manusia dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel peran internal audit adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11

Uji Validitas Variabel Peran Internal Audit

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,251	0,371	Valid
2	Pertanyaan 2	0,251	0,430	Valid
3	Pertanyaan 3	0,251	0,576	Valid
4	Pertanyaan 4	0,251	0,524	Valid

Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa uji validitas indikator peran internal audit hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua nilai r hitung pada indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada peran internal audit dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12

Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Indikator	R	R	Ket
		Tabel	Hitung	
1	Pertanyaan 1	0,251	0,515	Valid
2	Pertanyaan 2	0,251	0,596	Valid
3	Pertanyaan 3	0,251	0,620	Valid
4	Pertanyaan 4	0,251	0,519	Valid
5	Pertanyaan 5	0,251	0,558	Valid

6	Pertanyaan 6	0,251	0,672	Valid
7	Pertanyaan 7	0,251	0,324	Valid
8	Pertanyaan 8	0,251	0,448	Valid

Berdasarkan Tabel 5.12 diketahui bahwa uji validitas indikator kualitas laporan keuangan daerah hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua nilai hasil r hitung pada indikator melebihi nilai r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada kualitas laporan keuangan daerah dapat dilakukan perhitungan selanjutnya.

Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dilihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan, apakah stabil atau konstan. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

Tabel 5.13

Uji Reliabilitas Variabel

No	Indikator Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Standarisasi	Keterangan
1.	Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah	0,855	0,6	Reliabel
2.	Pemahaman Akuntansi	0,773	0,6	Reliabel
3.	Kompetensi SDM	0,653	0,6	Reliabel
4.	Peran Internal Audit	0,658	0,6	Reliabel
	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,811	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.13 diatas dapat diketahui bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, nilai *cronbach alpha* sebesar $0,855 >$ dari nilai standarisasi $0,6$. Kemudian pada variabel pemahaman akuntansi *cronbach alpha* sebesar $0,773 > 0,6$. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia nilai *cronbach alpha* sebesar $0,653 > 0,6$. Variabel peran internal audit mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar $0,658 > 0,6$. Dan variabel Kualitas laporan keuangan daerah mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar $0,811 > 0,6$. Oleh karena itu variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, dan kualitas laporan keuangan daerah dapat dikatakan

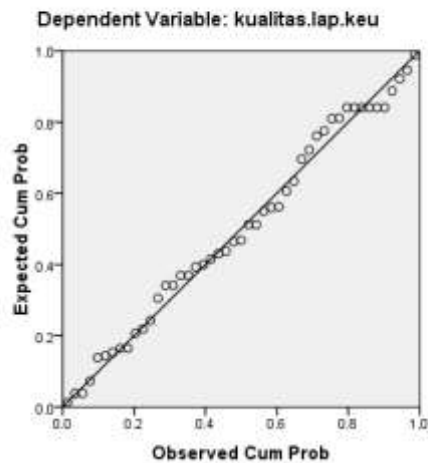
reliabel karena mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih besar dari nilai standarisasi sebesar 0,6.

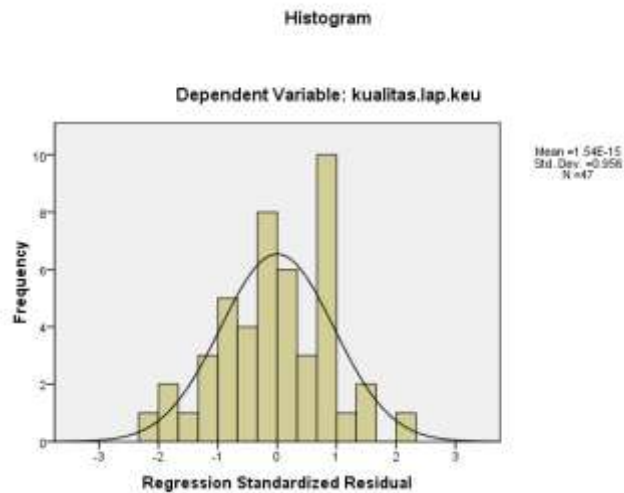
5.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan grafik *Normal P-P Plot* dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Berikut hasil pengujian normalitas:

Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pada grafik normal plot titik – titik menyebar di sekitar dan searah garis diagonal dan pada grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang menceng ke kiri dan tidak normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

5.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan besaran *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Adanya multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai *VIF* < 10. Di bawah ini adalah hasil perhitungan melalui SPSS:

Tabel 5.14
Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.935	4.971		.590	.558		
	pemanfaatan.SIA.keu.dae	.080	.150	.086	.538	.594	.412	2.426
	pemahaman.akt	-.423	.369	-.146	-1.147	.258	.649	1.541
	kompetensi.sdm	.247	.180	.219	1.373	.177	.413	2.422
	peran.internal.audit	1.114	.276	.585	4.029	.000	.500	2.000

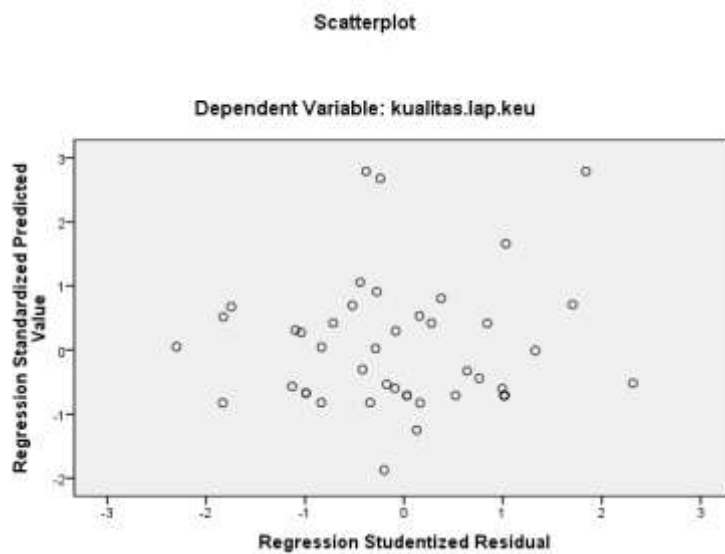
a. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance (0,412; 0,649; 0,413; 0,500) > 0,10 dan nilai VIF (2,426; 1,541; 2,422; 2,000) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ini terbebas dari problem multikolinieritas.

5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Hasil grafik scatterplot adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari titik - titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu.

5.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Koefisien Regresi

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.16
Koefisien Regresi

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.935	4.971		.590	.558		
	pemanfaatan.SIA.keu.dae	.080	.150	.086	.538	.594	.412	2.426
	pemahaman.akt	-.423	.369	-.146	-1.147	.258	.649	1.541
	kompetensi.sdm	.247	.180	.219	1.373	.177	.413	2.422
	peran.internal.audit	1.114	.276	.585	4.029	.000	.500	2.000

a. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,935 + 0,080X_1 - 0,423X_2 + 0,247X_3 + 1,114X_4 + e$$

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t. Nilai t-tabel dengan jumlah observasi 47, variabel bebas 4 dan $\alpha=5\%$ sebesar 2,018. Dari hasil pengujian didapat nilai t hitung sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

dari hasil estimasi variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,538 < t_{tabel} = 2,018$ dengan signifikansi sebesar $0,594 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama ditolak.

b. Pengujian Hipotesis 2

dari hasil estimasi variabel pemahaman akuntansi diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,147 < t_{tabel} = 2,018$ dengan signifikansi sebesar $0,258 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa

dengan adanya pemahaman akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua ditolak.

c. Pengujian Hipotesis 3

dari hasil estimasi variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,373 < t_{tabel} = 2,018$ dengan signifikansi sebesar $0,177 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama ditolak.

d. Pengujian Hipotesis 4

dari hasil estimasi variabel peran internal audit diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,029 > t_{tabel} = 2,018$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama ditolak.

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F_{tabel} dengan $n = 47$, variabel bebas = 4 dan $\alpha=5\%$ adalah sebesar 2,44. Dari pengujian simultan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.17
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226.117	4	56.529	13.217	.000 ^a
	Residual	179.628	42	4.277		
	Total	405.745	46			

a. Predictors: (Constant), peran.internal.audit, pemahaman.akt, kompetensi.sdm, pemanfaatan.SIA.keu.dae

b. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 13,217 > F_{tabel} = 2,44$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

5.3.6 Analisis Koefisien Determinasi

Untuk menguji besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square (R^2). Berikut hasil yang diperoleh:

Tabel 5.18
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.557	.515	2.06806

a. Predictors: (Constant), peran.internal.audit, pemahaman.akt, kompetensi.sdm, pemanfaatan.SIA.keu.dae

b. Dependent Variable: kualitas.lap.keu

Pada tabel 5.18 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R^2 sebesar 0,515. Hal ini berarti bahwa variasi kualitas laporan keuangan daerah sebesar 51,5% dijelaskan oleh variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit sedangkan 48,5% dijelaskan oleh variabel lainnya.

5.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis tentang hubungan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil pengujian menunjukkan menolak hipotesis bahwa dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan menghasilkan laporan akuntansi di pemerintah Kota Semarang lebih baik ditolak.

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi belum tentu akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian adanya jaringan sistem informasi akuntansi belum dapat membantu pemerintah daerah Kota Semarang dalam menghasilkan laporan keuangan yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

2. Pemahaman Akuntansi

Hasil pengujian menunjukkan menolak hipotesis dengan adanya orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti tentang akuntansi akan menghasilkan laporan akuntansi di pemerintah Kota Semarang lebih baik ditolak.

Setiap dilakukan peningkatan pemahaman akuntansi pada aparatur pemerintah Kota Semarang belum tentu dapat meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Semarang

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hasil pengujian menunjukkan menolak hipotesis dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten diharapkan akan menghasilkan laporan akuntansi di pemerintah Kota Semarang lebih baik ditolak.

Dengan demikian, jika kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi pada pemerintah daerah di Kota Semarang, baik dalam artian SDM keuangan/akuntansi tersebut kompeten, maka kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Semarang belum tentu akan memenuhi karakteristik kualitatif.

4. Peran Internal Audit

Hasil pengujian menunjukkan menolak hipotesis dengan adanya peran internal audit diharapkan akan menghasilkan laporan akuntansi di pemerintah Kota Semarang lebih baik diterima.

Dengan demikian, jika peran internal audit selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah di Kota Semarang mampu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu, maka dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Semarang maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kota Semarang.
2. Variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kota Semarang.
3. Variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kota Semarang.
4. Variabel peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kota Semarang

6.2 Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup seluruh kantor aparatur yang ada di pemerintah Kota Semarang.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya akan menambah beberapa variabel independen dan dependen yang lebih kompleks dalam penelitian ini, karena penelitian ini masih sangat sederhana sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta
- Poerwadaminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka
- Republik Indonesia. 2007. *PP Republik Indonesia No. 38 tentang Pembagian Uusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. *Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2006. *Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. *PP No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. *PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. *PP Republik Indonesia No. 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. *UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. *UU No. 17 tentang Keuangan Negara*. Indonesia
- Rovianyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Kauangan Daerah.
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Internal Auditing*. Edisi 5. Salemba Empat
- Yuliani, et al. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3 No.2 hal 206-220

Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian

Judul : Dampak Peranan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Serta Peran Internal Audit Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota
Semarang

Skema Hibah : Penelitian Dosen Pemula

Peneliti / Pelaksana
Nama Ketua : LILIS SETYOWATI
Perguruan Tinggi : Universitas Dian Nuswantoro
NIDN : 0607018703
Nama Anggota (1) : WIKAN ISTHIKA S.E.
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Dana Tahun Berjalan : Rp 12.500.000,00
Dana Mulai Diterima Tanggal : 2014-06-06

Rincian Penggunaan

1. HONOR OUTPUT KEGIATAN				
Item Honor	Volume	Satuan	Honor/Jam (Rp)	Total (Rp)
1. honor ketua	30.00	jam	50.000	1.500.000
2. honor anggota	25.00	jam	40.000	1.000.000
3. honor mahasiswa survey	4.00	orang	250.000	1.000.000
Sub Total (Rp)				3.500.000,00
2. BELANJA BAHAN				
Item Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1. print	300.00	lembar	1.000	300.000
2. kalkulator	1.00	unit	165.000	165.000
3. dvd rw	7.00	buah	5.000	35.000
4. flash disk	2.00	buah	200.000	400.000
5. jilid	1.00	buah	2.500	2.500
6. kertas hvs	1.00	rim	34.400	34.400
7. kertas	2.00	rim	32.000	64.000
8. kertas	1.00	rim	58.600	58.600
9. poto kopi	86.00	lembar	200	17.200
10. jilid	4.00	buah	10.000	40.000

11. sewa komputer	1.00	bulan	100.000	100.000
12. kertas	1.00	rim	32.000	32.000
13. print	200.00	lembar	1.000	200.000
14. matere	3.00	buah	7.000	21.000
15. jilid	1.00	buah	10.000	10.000
16. sewa komputer	1.00	bulan	100.000	100.000
17. poto kopi	800.00	lembar	250	200.000
18. atk	1.00	set	45.000	45.000
19. poto kopi	54.00	lembar	200	10.800
20. atk	1.00	set	60.000	60.000
21. pulpen	10.00	lusin	20.700	207.000
22. ketas	2.00	rim	28.500	57.000
23. sewa komputer	1.00	bulan	100.000	100.000
24. matere	2.00	buah	7.000	14.000
25. poto kopi	60.00	lembar	200	12.000
26. sewa komputer	1.00	bulan	200.000	200.000
27. jilid	2.00	buah	10.000	20.000
28. jilid	150.00	lembar	200	30.000
29. jilid	3.00	buah	10.000	30.000
30. print	175.00	lembar	2.000	350.000
31. jilid	1.00	buah	4.000	4.000
32. poto kopi	200.00	lembar	300	60.000
33. print	75.00	lembar	2.000	150.000
34. foto kopi	100.00	lembar	300	30.000
35. kertas hvs	2.00	rim	35.000	70.000
36. matere	4.00	lembar	7.000	28.000
37. jilid	5.00	buah	10.000	50.000
38. call paper	1.00	hari	750.000	750.000
39. sewa mobil	2.00	hari	400.000	800.000
40. olah data	7.00	hari	100.000	700.000
Sub Total (Rp)				5.557.500,00

3. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA				
Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1. inap hotel	1.00	malam	500.000	500.000
Sub Total (Rp)				500.000,00
4. BELANJA PERJALANAN LAINNYA				
Item Perjalanan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1. konsumsi	1.00	kali	100.000	100.000
2. transportasi	1.00	kali	100.000	100.000
3. konsumsi	1.00	kali	200.000	200.000
4. transportasi	1.00	kali	100.000	100.000
5. konsumsi	1.00	kali	100.000	100.000
6. transportasi	1.00	kali	100.000	100.000
7. konsumsi	1.00	kali	100.000	100.000
8. transportasi	1.00	kali	100.000	100.000
9. biaya perjalanan survey	1.00	kali	200.000	200.000
10. biaya perjalanan survey	1.00	kali	100.000	100.000
11. call paper	2.00	hari	500.000	1.000.000
12. konsumsi	4.00	porsi	70.000	280.000
Sub Total (Rp)				2.480.000,00
Total Pengeluaran Dalam Satu Tahun (Rp)				12.037.500,00

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian

Semarang, 3 - 11 - 2014
Ketua,

(Juli Ratnawati, SE., M.Si)
NIP/NIK 0686.11.2000.193

(LILIS SETYOWATI)
NIP/NIK 0686.11.2010.388